

**PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA, AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
STUDI PADA KECAMATAN BANDA RAYA
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

MAITSA RIHADATUL AISY
1902110124



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 13 September 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MAITSA RIHADATUL AISY
NPM : 1902110124

Dengan judul:

**PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA, AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Zulkifli Umar, SE., M.Si, Ak. CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

Syamsidar, SE., M.Si., Ak
NIK. 19730921 199901 2 001

Pembimbing II

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si.MM
NIK. 19700408 199401 1 001



Mengetahui,
Dekan,

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si. MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 13 September 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MAITSA RIHADATUL AISY
NPM : 1902110124

Dengan judul:

**PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA, AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 28 Agustus 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si. MM

Sekretaris

Syamsidar, SE., M.SI., Ak

Anggota

Eva Susanti, SE., M.Si., Ak

Anggota

Rusnaldi, SE., M.Si



Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 13 September 2022
Yang Menyatakan



MAITSA RIHADATUL AISY

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Maitsa Rihadatul Aisy**

NPM : 1902110124

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 13 September 2022

Banda Aceh, 13 September 2022

Yang Menyatakan,



MAITSA RIHADATUL AISY

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, hidayah, ketabahan, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Peran perangkat desa, Aksesibilitas laporan keuangan dan Sistem akuntansi keuangan desa masyarakat Terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Studi Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh”. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Banda Aceh. Dalam kesempatan ini penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan dan penyusunan skripsi ini.

1. Beribu terimakasih penulis ucapkan kepada Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan doa dan restunya kepada penulis
2. **Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdaiyah Banda Aceh, dan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. **Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA** selaku Ketua jurusan program studi Akuntansi Fakultas Muhammadiyah Aceh.

4. **Terimakasih kepada Syamsidar, SE., M.Si. Ak** selaku Pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya membantu penulis menyelesaikan skripsi ini
5. Termakasih pula kepada teman seperjuangan angkatan 2019 telah banyak memberikan dorongan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya staf pengajar pada prodi Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendak-Nya

Banda Aceh, Januari 2022

Maitsa Rihadatul Aisy

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv

BAB

I	PENDAHULUAN	
	1	
	1.1 Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
	1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
	1.3 Tujuan Penelitian.....	6
	1.4 Manfaat Penelitian.....	7
	1.4.1 Manfaat Terorotis	7
	1.4.2 Manfaat Praktis	7
	1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II	LANDASAN TEORI	8
	2.1 Landasan Teoritis	8
	9	
	2.1.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	8
	2.1.2 Manfaat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	9
	2.1.3 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	10
	10	
	2.2 Peran Perangkat Desa	10
	2.2.1 Manfaat Peran Perangkat Desa	12
	2.2.2 Indikator Peran perangkat desa	12
	2.3 Aksesibilitas laporan keuangan	13
	2.3.1 Pengertian Aksesibilitas laporan keuangan	13
	2.3.2 Manfaat Aksesibilitas laporan keuangan	13
	2.3.3 Indikator Aksesibilitas laporan keuangan	14
	2.4 Sistem Akuntansi Keuangan Desa	14
	2.4.1 Tujuan Sistem akuntansi keuangan desa masyarakat	15
	17	
	2.4.2 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Desa	16
	2.5 Penelitian Sebelumnya	17
	2.6 Kerangka Pemikiran	20
	2.6.1 Hubungan Peran perangkat desa terhadap Akuntabilitas	20
	pengelolaan keuangan desa.....	
	2.6.2 Hubungan Aksesibilitas laporan keuangan terhadap	20
	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	

2.6.3	Hubungan Sistem akuntansi keuangan desa Masyarakat terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	21
2.7	Hipotesis penelitian	22

BAB III	METODELOGI PENELITIAN	23
3.1	Desain Penelitian	23
3.1.1	Tujuan Studi	23
3.1.2	Jenis Investigasi	23
3.1.3	Horizon Waktu	24
3.1.4	Unit Analisis	24
3.2	Populasi dan Sampel	24
		22
3.3	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	25
3.4	Operasional variabel	26
3.5	Metode Analisis Data	28
3.6	Pengujian Data	29
3.6.1	Pengujian Validitas	29
3.6.2	Pengujian Reliabilitas	30
3.6.3	Pengujian Asumsi Klasik	30
3.7	Pengujian Hipotesis	31

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Populasi Penelitian	24
Tabel 3.2 Skala Pengukuran	26
Tabel 3.3 Operasional Variabel	27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	21

**PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA, AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH**

MAITSA RIHADATUL AISY
1902110124

Pembimbing 1) : Syamsidar, SE., M.Si.Ak

Pembimbing 2) : Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah seluruh Desa yang ada di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh yaitu sebanyak 10 Desa, dengan jumlah yaitu 40 sampel yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa serta Tuha Peut Gampong. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Nilai konstanta sebesar 4.777 dapat diartikan bahwa tanpa adanya peran perangkat desa aksesibilitas laporan keuangan dan sistem keuangan desa, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah ada nilai sebesar 4,777. Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,586 artinya sebesar 58,6 % perubahan-perubahan dalam variabel terikat (sistem keuangan desa) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam Faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem keuangan desa.

Kata Kunci : *Peran Perangkat Desa Aksesibilitas, Laporan Keuangan, Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*

**THE INFLUENCE OF THE ROLE OF VILLAGE EQUIPMENT,
ACCESSIBILITY OF FINANCIAL STATEMENTS AND VILLAGE
FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS ON VILLAGE FINANCIAL
MANAGEMENT ACCOUNTABILITY IN BANDA RAYA DISTRICT
BANDA ACEH CITY**

MAITSA RIHADATUL AISY
1902110124

Mentor 1) : Syamsidar, SE., M.Si.Ak

Mentor 2) : Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether the role of village officials, the accessibility of financial reports and the financial accounting system of the village community simultaneously affected the accountability of village financial management in Banda Raya District, Banda Aceh City. The population of this research is all villages in Banda Raya Subdistrict, Banda Aceh City, as many as 10 villages, with a total of 40 samples, namely the Village Head, Village Treasurer and Tuha Peut Gampong. Based on the results of the research that has been done, the role of village officials, accessibility of financial reports and the village financial system affect the accountability of village financial management in Banda Raya District, Banda Aceh City. The constant value of 4.777 can be interpreted that without the role of village officials in the accessibility of financial reports and the village financial system, the accountability of village financial management has a value of 4.777. The coefficient of determination (R^2) of 0.586 means that 58.6% of changes in the dependent variable (village financial system) can be explained by changes in influencing factors such as the role of village officials, accessibility of financial statements and the village financial system.

Keywords: Role of Village Apparatus Accessibility, Financial Reports, Village Financial System and Accountability of Village Financial Management

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Permasalahan

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Seiring perkembangan dan perubahan dalam kebijakan desentralisasi, maka UU No. 32 Tahun 2004 digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU 23/2014, desa dan/atau desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa. Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa, yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Dinaroy, 2015).

Desa sebagai sebuah entitas yuridis, sosial dan politik memiliki beberapa karakteristik yang amat penting dalam menyokong keberhasilan kehidupan masyarakatnya. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh desa (Bawono, 2016). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam mengidentifikasi masalah masalah yang terjadi di desa akan menaikkan mutu dari suatu sistem akuntansi yang ada di desa tersebut.

Pengidentifikasian terhadap pencatatan, penganalisisan dalam pencatatan di sistem akuntansi keuangan akan membawa perubahan yang baik terhadap akuntansi keuangan desa. Pengklasifikasian yang baik dan benar akan membuat peningkatan mutu suatu desa dengan contoh membuat laporan keuangan disesuaikan dengan pos-pos yang ada dan juga dibuat oleh perangkat desa yang ahli sesuai dengan bidangnya karena sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik apabila di pengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah peran perangkat desa (Musdalifah, 2020). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015, perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus, berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat serta Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Dengan semakin besarnya dana dan kewenangan yang diberikan kepada desa, maka berdampak pula pada kualitas kompetensi dan kemampuan teknis para perangkat desa. Kompetensi dan pengetahuan para perangkat desa juga harus ditambah agar fungsi perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa menjadi lebih maksimal. Persoalannya adalah apakah Pemerintah Kabupaten Kota memiliki *political will* dan dana yang

mencukupi untuk menambah tingkat kompetensi dan pengetahuan para perangkat desa di wilayahnya.

Selain peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan juga dapat membawa pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2012). Kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah daerah akan menguntungkan masyarakat dan juga orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk mengambil data yang sudah disediakan dan juga akan digunakan sebagaimana mestinya.

Asas keterbukaan dalam Undang-Undang Desa itu juga selaras dengan amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang tersebut memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik serta memberikan kewajiban kepada badan-badan publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas (Astuti, 2019).

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sistem akuntansi keuangan desa (Musdalifah, 2020). Sistem akuntansi keuangan desa merupakan kumpulan elemen untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai dan sistem akuntansi keuangan desa dibuat oleh kepala desa guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama (Musdalifah, 2020).

Dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Sekretaris dan perangkat desa lainnya termasuk dalam PTPKD ini. Perangkat desa lainnya juga termasuk bendahara desa. Bendahara desa harus membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu bendahara desa harus memahami pengelolaan keuangan desa secara baik dan benar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dari siklus pengelolaan keuangan desa di atas, bendahara desa menjadi bagian yang cukup penting, terutama pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa beberapa pembukuan wajib diselenggarakan oleh bendahara desa.

Berdasarkan artikel di koran Serambi Indonesia, Hasyim menjelaskan bahwa sebanyak tujuh gampongdi Banda Aceh belum mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Banda Aceh. Tujuh gampong yang belum mengajukan APBG yaitu, Gampong Neusu Jaya, Lampeuot, Lambaro Skep, Lamgugob, Rukoh, Punge Jurong, dan Gampong Bitai. Menurutnya, penyebab keterlambatan sejumlah gampong mengajukan APBG karena APBG merupakan kebijakan baru di kalangan aparatur gampong. Selain itu, mereka juga kesulitan tenaga ahli

penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diakibatkan oleh belum adanya pemahaman laporan keuangan desa (Tribunnews, 2015). Tanpa pemahaman laporan keuangan yang baik mengakibatkan laporan keuangan yang dipublikasikan terdapat kesalahan material dalam penyajian angka, tidak sesuai dengan pelaporan dan tidak tepat waktu dalam penyampaiannya sehingga berdampak buruk bagi pengguna laporan itu sendiri (Murina dan Rahmawaty, 2017).

Menurut hasil penelitian Agustian (2020), Desa Lam Ara juga pernah melanggar peraturan perundangan desa. Di bulan Juli, seharusnya desa Desa Lam Ara telah mengalokasikan 30% belanja tidak langsung dan 70% belanja langsung, namun pada kenyataannya pengalokasian terhadap belanja tidak langsung kurang dari 30% dan pengalokasian belanja langsung kurang dari 70%. Hal inilah yang tidak sejalan dengan peraturan perundangan yang telah berlaku dan dapat menjadi sebuah sumber penyimpangan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh Peran perangkat desa, Aksesibilitas laporan keuangan dan Sistem akuntansi keuangan desa masyarakat Terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Studi Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh?
2. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh?
3. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh?
4. Apakah sistem akuntansi keuangan desa masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
3. Untuk mengetahui apakah aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

4. Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan desa masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh terkait dalam mendukung tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu penyajian informasi untuk penelitian serupa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi objek penelitiannya, yaitu dibatasi hanya meneliti mengenai pengaruh peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

BAB II

KAJIAN PERPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris (*accountability*) yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hubungan ini, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada masyarakat, mengukur sejauh mana pertanggungjawaban dari penentu kebijakan yaitu pemerintah telah merealisasikan kebijakannya dalam upaya memenuhi harapan masyarakat (Astuti, 2019).

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2016).

Terkait dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan, bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota dan memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan Daerah Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah transparan, akuntabel, sistem akuntansi keuangan desa serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis (Setyadi, 2019:9). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016: 39) adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan, keuangan dan tujuan desa, yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian desa.

2.1.1.2 Manfaat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Nafidah dan Mawar, 2015:12).

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama bagi organisasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal dan bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Manfaat dari akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit diwujudkan daripada memberantas korupsi (Mardiasmo, 2016).

2.1.1.3 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas menjadi sangat penting karena digunakan untuk evaluasi proses keefektifan dari pejabat publik atau badan publik yang akan memastikan bahwa mereka memberikan potensi maksimal, memberikan nilai sejumlah uang seperti dalam ketentuan pelayanan publik, menanamkan kepercayaan pada pemerintah dan menjadi responsif kepada masyarakat yang harus mereka layani.

Menurut Setyadi (2019:125), akuntabilitas pengelolaan keuangan desa meliputi :

1. Pelaporan

Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara menyebutkan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota.

2. Pertanggungjawaban

Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

2.1.2 Peran Perangkat Desa

2.1.2.1 Pengertian Peran Perangkat Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa pada BAB 1 pasal 1 ayat 5 dalam peraturan menteri ini, yang maksud dengan perangkat desa adalah unsur

staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan (Musdalifah, 2020).

Perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang tedapat didesa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam mejalankan tugas dan wewenang kepala desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa dimana tempat tugasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kewenangan dalam pengangkatan serta pemberhentian seorang bagian dari pemerintahan desa adalah wewenang dari seorang kepala desa, akan tetapi didalam melaksanakan wewenangnya itu tentunya seorang kepala desa tetap harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam undang-undang ataupun peraturan yang berlaku (Djalil, 2014).

Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas pada pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana tempat dia bertugas, seorang perangkat desa juga ikut dalam membantu tugas yang dijalankan oleh seorang kepala desa dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu seluruh perangkat desa juga diwajibkan mempunyai sebuah komitmen, keahlian, keterampilan, perasaan dan perhatian yang tulus serta juga memerlukan sebuah rasa peduli yang tinggi oleh seorang perangkat desa guna melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat (Makalalang, 2017).

2.1.2.2 Manfaat Peran Perangkat Desa

Peran perangkat desaa dalah untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Keterampilan atau kemampuan yang diperlukan aparatur desa ditunjukkan melalui kemampuan dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan. Dengan tujuan agar masyarakat yang dilayani mendapatkan rasa yang nyaman dan puas dalam pelayanan yang telah dilakukan dari perangkat desa tersebut sehingga dapat memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang terdapat di desa tersebut.

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 pasal 48, fungsi atau peran perangkat desa yaitu:

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

2.1.2.3 Indikator Peran perangkat desa

Secara landasan hukumnya, status dari Perangkat Desa tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 pasal 48 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015. Sehingga yang dimaksud dengan bagian dari Perangkat Desa yaitu meliputi:

1. Sekretaris Desa,
2. Pelaksana Wilayah Desa, dan
3. Pelaksana Teknis Desa

2.1.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Aksesibilitas laporan keuangan

Menurut Musdalifah (2020), aksesibilitas merupakan Kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah daerah akan menguntungkan masyarakat dan juga orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk mengambil data yang sudah disediakan dan juga akan digunakan sebagaimana mestinya.

Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan memberikan pengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah (Apriliani, 2015).

Menurut Aliyah dan Nahar (2012,142), aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan dalam memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder.

2.1.3.2 Manfaat Aksesibilitas laporan keuangan

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan, namun juga kepada masyarakat yang

sudah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik (Lewier dan Kurniawan, 2016).

2.1.3.3 Indikator Aksesibilitas laporan keuangan

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 103, bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Wahida, 2015).

Menurut Nurmutmainah (2015), terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas laporan keuangan yaitu :

1. Terbuka di media massa seperti Koran
2. Mudah diakses
3. Ketersediaan informasi

2.1.4 Sistem Akuntansi Keuangan Desa

2.1.4.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Desa

Sistem akuntansi keuangan merupakan kumpulan elemen untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai dan sistem akuntansi keuangan desa dibuat oleh kepala desa guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama (Musdalifah, 2020). Untuk keuangan Desa, pemerintah daerah membuat sebuah aplikasi yang bernama Siskeudes. Aplikasi Siskeudes, merupakan aplikasi yang diterbitkan oleh BPKP dalam rangka memudahkan pemerintah desa untuk melaksanakan tanggung

jawabnya dalam melaporkan keuangan desa. aplikasi ini sangat mudah untuk dipahami dan dimengerti, namun membutuhkan ketelitian. Dengan tampilan yang sederhana namun sangat membantu dan baik digunakan. Bisa menggunakan jaringan internet atau tidak. Aplikasi ini dibuat dengan menyesuaikan proses dan tahap pelaporan keuangan dan dokumen yang ada hanya akan di input saja karena sudah tertera dengan baik (Nadir, 2013).

Aplikasi siskeudes merupakan alat bantu yang diperuntukan untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dalam beberapa tahap mulai dari perencanaan, melaksanakan penatanusahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban secara komputerisasi.

2.1.4.2 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Masyarakat

Dengan disahkannya undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa yang diberikan kesempatan dalam mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk didalamnya untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa. kemudian sesuai dengan UU Nomor 4 tentang desa pasal 72. Pengelolaan keuangan desa yang berasal dari pendapatan asli desa Dan pendapatan transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagian hasil pajak dan restribusi kabupaten/kota, dan bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota.

Aplikasi keuangan desa yang diberinama Siskeudes bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU desa terutama dalam bidang keuangan dapat benar-benar dijalankan dengan baik oleh seluruh pemerintahan desa. Pemerintah desa juga dapat melaksanakan

tanggungjawabnya dalam pelaporan keuangan secara akuntabel dan transparan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan (Nadir, 2013).

2.1.4.3 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Desa

Membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa, antara lain:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:
 - a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

3. Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Musdalifah (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa memiliki pengaruh yang kuat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon

Lily (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Desa Payakumbuh).

Redi (2019) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Aksesibilitas laporan keuangan dan Peran perangkat desa, terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintahan di kabupaten Dairi. Hasil penelitian menunjukkan kuntabilitas dan Peran perangkat desa memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap

pengelolaan keuangan baik parsial maupun simultan pada pemerintahan di kabupaten Dairi.

Andriani (2019) Pengaruh Transaparansi, Aksesibilitas laporan keuangan, dan Sistem akuntansi keuangan desa Masyarakat terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transaparansi, Aksesibilitas laporan keuangan, dan Sistem akuntansi keuangan desa Masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Larasati (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan sistem akuntansi keuangan desa masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kabupaten Bayuwangi. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan sistem akuntansi keuangan desa masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kabupaten Bayuwangi. Penjelasan Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul / Nama	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon (Musdalifah, 2020)	Regresi Linier Berganda	Variabel peran perangkat desa (X1) Aksesibilitas laporan keuangan (X2) Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X1) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Memiliki variabel independen dan dependen yang sama	Memiliki populasi dan referensi yang berbeda

2.	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Desa Payakumbuh) Lily (2015)	Regresi Linier Berganda	secara parsial sistem akuntansi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Memiliki variabel independen dan dependen yang sama	Memiliki populasi dan referensi yang berbeda
3.	Pengaruh Aksesibilitas laporan keuangan dan Peran perangkat desa, terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintahan di kabupaten Dairi Redi (2019)	Regresi Linier Berganda	Aksesibilitas laporan keuangan dan Peran perangkat desa memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan baik parsial maupun simultan pada pemerintahan di kabupaten Dairi	Memiliki variabel independen dan dependen yang sama	Memiliki populasi dan referensi yang berbeda
4.	Pengaruh Transaparansi, Aksesibilitas laporan keuangan, dan Sistem akuntansi keuangan desa Masyarakat terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Andriani (2019)	Regresi Linier Berganda	Tranparansi, Aksesibilitas laporan keuangan, dan Sistem akuntansi keuangan desa Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Memiliki variabel independen dan dependen yang sama	Memiliki populasi dan referensi yang berbeda
5.	Pengaruh kompetensi aparatur,		Kompetensi aparatur, komitmen	Memiliki variabel independen	Memiliki populasi dan

	komitmen organisasi, dan sistem akuntansi keuangan desa masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kabupaten Bayuwangi Larasati (2018)		organisasi, dan sistem akuntansi keuangan desa masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kabupaten Bayuwangi	dan dependen yang sama	referensi yang berbeda
--	---	--	---	------------------------	------------------------

Sumber : Data diolah, (2022)

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

penggunaan peran perangkat desa sebagai alat analisis pengelolaan akuntabilitas dana desa secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pada pemerintah desa masih sangat terbatas hal ini dikarenakan, keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintahan desa yang sikap dan cakupnya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial. Kemudian penilaian keberhasilan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai penilaian pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa lebih ditekankan pada pendapatan target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur Alokasi Dana Desanya. Maka dari itu perlu suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa.

Berdasarkan penelitian Redi (2019) menyatakan bahwa perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penelitian Musdalifah (2020) menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan desa. Artinya bahwa dari hasil penelitian memberikan bukti bahwa dengan berperannya perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa akan berkualitas baik dan transparan.

2.3.2 Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah desa harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apalah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah desa harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Berdasarkan penelitian Andriani (2019) dikatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah. Semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan tercapai sebaliknya jika aksesibilitas laporan keuangan rendah, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan kurang transparan.

2.3.3 Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

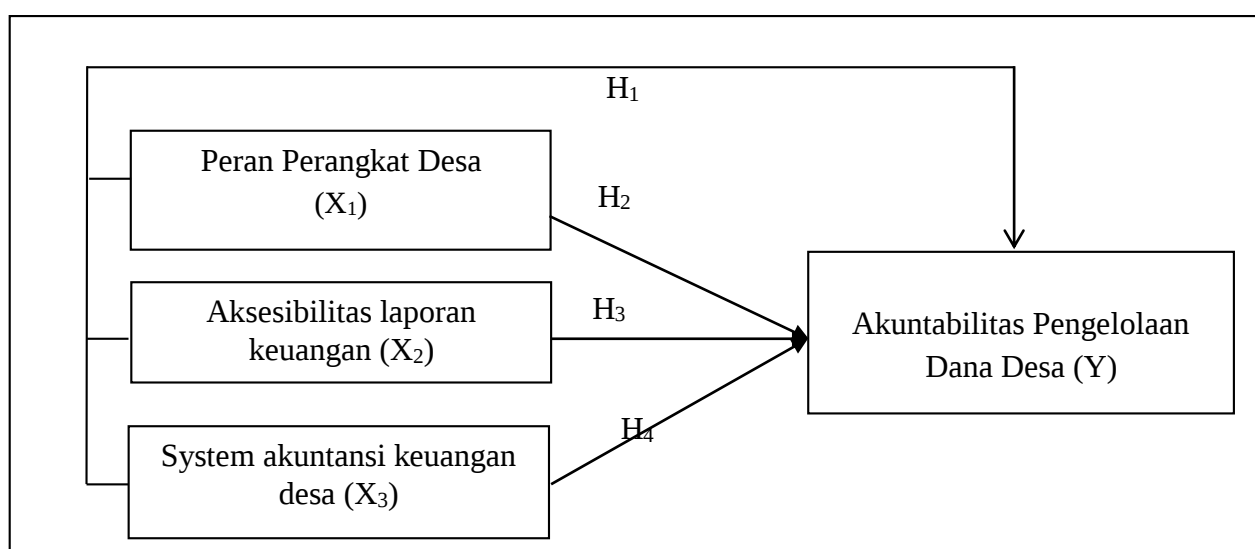
Peraturan diterapkan agar mampu mendorong pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa baik dari pencatatan sampai pelaporan secara baik dan tepat waktu. Menurut Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang semua kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat besar dalam memantau pengelolaan keuangan dan kinerja desa khususnya dana desa. berdasarkan undang-undang No. 6 Tahun 2014 undang undang ini mengatur mengenai sistem pengelolaan dana desa, mengenai dana desa dimana dana desa ini bersumber dari APBN kabupaten/kota kemudian sistem yang digunakan dalam melakukan pengelolaan baik dalam penerimaan ataupun pengeluarannya berdasarkan sistem akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pemerintah desa.

Berdasarkan penelitian Larasati (2018) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan analisis regresi linier berganda yang diteliti oleh Musdalifah (2020) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik

penerapan dari sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik juga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Dari kerangka konseptual yang ditulis telah tergambar prosedur dan apa yang akan dikaji didalam penelitian Adapun skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

H_{a1}: Peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

H_{a2}: Peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

H_{a3}: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

H_{a4}: Sistem akuntansi keuangan desa masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2017: 152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi empat elemen yaitu:

3.1.1 Tujuan studi

Tujuan studi ini adalah pengujian hipotesis, yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

3.1.2 Jenis investigasi

Penelitian ini bersifat kausalitas, yaitu tipe penelitian yang menyatakan ada pengaruh antara variabel independen yaitu pengaruh antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

3.1.3 Horizon waktu

Dalam penelitian ini horizon waktu yang digunakan adalah *one shot*, yaitu horizon waktu yang mengumpulkan data penelitian hanya dalam sekali kumpul.

3.1.4 Unit analisis

Unit analisis merujuk kepada kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner yang dibagikan kepada pegawai secara individu.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis, yaitu objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya (Arikunto, 2013). Populasi penelitian ini adalah seluruh Desa yang ada di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh yaitu sebanyak 10 Desa, dengan jumlah yaitu 40 sampel yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa serta Tuha Peut Gampong. Seperti terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No	Populasi	Kepala desa	Bendahara Desa	Tuha Peut
1	Lhong Raya	1	1	2
2	Lhong Cut	1	1	2
3	Mibo	1	1	2
4	Lam Ara	1	1	2
5	Peunyerat	1	1	2
6	Lampeuot	1	1	2

7	Lamlagang	1	1	2
8	Geuceu Iniem	1	1	2
9	Geuceu Kayee Jato	1	1	2
10	Geuceu Komplek	1	1	2
Total		10	10	20

Sumber : BPS, 2022

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersumber dari pengumpulan data primer dilakukan dengan cara membagikan kuesioner yang telah dipersiapkan kepada seluruh responden yaitu 40 orang. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden (Arikunto, 2013). Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup yaitu pertanyaan yang dibuat berbentuk pilihan yang telah disediakan. Kuesioner tersebut selanjutnya disebarkan kepada seluruh responden.

Pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Interval yaitu skala yang tidak hanya mengelompokkan individu menurut katagori tertentu dan menentukan urutan kelompok, namun juga mengukur besaran (*magnetude*) perbedaan preferensi antar individu. Dimana jawaban masing-masing responden akan diberi skor dengan menggunakan 5 (lima) poin (Sekaran, 2017:129). Skala pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Skala Pengukuran

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

Data diolah: 2022

3.4 Operasional variabel

Definisi dan operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut dilapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas. Serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala interval yaitu skala yang tidak hanya mengelompokkan individu menurut kategori tertentu dan menentukan urutan kelompok, namun juga mengukur besaran (*magnitude*) perbedaan preferensi antar individu (Sekaran, 2017:117). Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Item Pertanyaan
Variabel : Dependen				
Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y)	kewajiban pihak pemegang amanah (<i>agent</i>) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,	1. Pelaporan 2. Pertanggungjawaban	Likert	1 – 2

	melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>principal</i>) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2016)			
Variabel : Independen				
Peran perangkat desa (X ₁)	bagian dari penyelenggara pemerintahan yang tedapat didesa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa dimana tempat tugasnya	1. Sekretaris Desa, 2. Pelaksana Wilayah Desa 3. Pelaksana Teknis Desa	Likert	1 – 3
Aksesibilitas laporan keuangan (X ₂)	Sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan memberikan pengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi	1. Terbuka dimedia masa seperti Koran 2. Mudah diakses 3. Ketersediaan informasi	Likert	1 – 3

	keuangan daerah (Apriliani, 2015).			
Sistem akuntansi keuangan desa masyarakat (X ₃)	Kumpulan elemen untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai dan sistem akuntansi keuangan desa dibuat oleh kepala desa guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama (Musdalifah, 2020).	1. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa 2. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa 3. Laporan realisasi penggunaan dana desa 4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa	Likert	1 – 4

Sumber: Data diolah (2022)

3.5 Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data, metode yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. Regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berdampak signifikan dan positif terhadap variabel dependen. Bentuk persamaan regresinya yaitu (Sugiyono, 2019:204) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X₁ = Peran perangkat desa

X₂ = Aksesibilitas laporan keuangan

X₃ = Sistem akuntansi keuangan desa masyarakat

e = Error

3.6 Pengujian Data

Sebelum data diolah lebih lanjut, harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Karena kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari pengguna instrumen.

3.6.1 Pengujian Validitas

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2019:224). Uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner dalam penelitian ini. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan uji *Person Product – Moment Coefficient of Correlation*. Penelitian dinyatakan valid, jika $R_{hitung} > R_{tabel}$.

3.6.2 Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas yaitu untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan pada uji reliabilitas adalah metode *Cronbach Alpha* (α) yang lazim digunakan untuk pengujian kuesioner. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau $\alpha > 0,6$ (Sekaran, 2017:182).

3.6.3 Pengujian Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan hasil yang sah (tidak bias) maka sebelum melakukan pengujian hipotesis atau analisis regresi maka akan terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yaitu meliputi pengujian :

a. Uji Normalitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut Ghazali (2016; 76-77) jika distribusi data adalah normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis normal. Dasar untuk pengambilan keputusan yaitu : Jika data menyebar diantara garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dan jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model asumsi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi, terjadi pengaruh yang signifikan antar prediktor dengan nilai residualnya. Jika berpengaruh signifikan maka telah terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan dalam mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas ialah dengan melakukan uji gletser. Jika nilai *sig.* pada tabel koefisien hasil regresi masing-masing variabel independen dengan residualnya signifikan (*sig.* < 0.10), maka hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak (*sig.* > 0.10),

maka hal ini mengindikasikan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

3.7 Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengukuran variabel dalam penelitian ini maka dilakukan pengujian untuk setiap hipotesis. Untuk menentukan menerima atau menolak hipotesis yang diajukan, maka dilakukan uji-F dan uji-t untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikan 5%.

1. Uji-F (uji secara bersama-sama)

H_{01} : Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa masyarakat secara simultan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

H_{a1} : Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima, peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

2. Uji-t (Parsial)

H_{02} : Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, peran perangkat desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

- H_{a2} : Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima, peran perangkat desa secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
- H_{o3} : Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_o diterima, aksesibilitas laporan keuangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
- H_{a3} : Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima, aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
- H_{o4} : Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_o diterima, sistem akuntansi keuangan desa masyarakat secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
- H_{a4} : Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima, sistem akuntansi keuangan desa masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2017: 152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi empat elemen yaitu:

3.1.1 Tujuan studi

Tujuan studi ini adalah pengujian hipotesis, yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

3.1.2 Jenis investigasi

Penelitian ini bersifat kausalitas, yaitu tipe penelitian yang menyatakan ada pengaruh antara variabel independen yaitu pengaruh antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

3.1.3 Horizon waktu

Dalam penelitian ini horizon waktu yang digunakan adalah *one shot*, yaitu horizon waktu yang mengumpulkan data penelitian hanya dalam sekali kumpul.

3.1.4 Unit analisis

Unit analisis merujuk kepada kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner yang dibagikan kepada pegawai secara individu.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis, yaitu objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya (Arikunto, 2013). Populasi penelitian ini adalah seluruh Desa yang ada di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh yaitu sebanyak 10 Desa, dengan jumlah yaitu 40 sampel yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa serta Tuha Peut Gampong. Seperti terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No	Populasi	Kepala desa	Bendahara Desa	Tuha Peut
1	Lhong Raya	1	1	2
2	Lhong Cut	1	1	2
3	Mibo	1	1	2
4	Lam Ara	1	1	2
5	Peunyerat	1	1	2
6	Lampeuot	1	1	2

7	Lamlagang	1	1	2
8	Geuceu Iniem	1	1	2
9	Geuceu Kayee Jato	1	1	2
10	Geuceu Komplek	1	1	2
Total		10	10	20

Sumber : BPS, 2022

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersumber dari pengumpulan data primer dilakukan dengan cara membagikan kuesioner yang telah dipersiapkan kepada seluruh responden yaitu 40 orang. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden (Arikunto, 2013). Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup yaitu pertanyaan yang dibuat berbentuk pilihan yang telah disediakan. Kuesioner tersebut selanjutnya disebarkan kepada seluruh responden.

Pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Interval yaitu skala yang tidak hanya mengelompokkan individu menurut katagori tertentu dan menentukan urutan kelompok, namun juga mengukur besaran (*magnetude*) perbedaan preferensi antar individu. Dimana jawaban masing-masing responden akan diberi skor dengan menggunakan 5 (lima) poin (Sekaran, 2017:129). Skala pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Skala Pengukuran

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

Data diolah: 2022

3.4 Operasional variabel

Definisi dan operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut dilapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas. Serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala interval yaitu skala yang tidak hanya mengelompokkan individu menurut kategori tertentu dan menentukan urutan kelompok, namun juga mengukur besaran (*magnitude*) perbedaan preferensi antar individu (Sekaran, 2017:117). Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Item Pertanyaan
Variabel : Dependen				
Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y)	kewajiban pihak pemegang amanah (<i>agent</i>) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,	1. Pelaporan 2. Pertanggungjawaban	Likert	1 – 2

	melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>principal</i>) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2016)			
Variabel : Independen				
Peran perangkat desa (X ₁)	bagian dari penyelenggara pemerintahan yang tedapat didesa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa dimana tempat tugasnya	1. Sekretaris Desa, 2. Pelaksana Wilayah Desa 3. Pelaksana Teknis Desa	Likert	1 – 3
Aksesibilitas laporan keuangan (X ₂)	Sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan memberikan pengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi	1. Terbuka dimedia masa seperti Koran 2. Mudah diakses 3. Ketersediaan informasi	Likert	1 – 3

	keuangan daerah (Apriliani, 2015).			
Sistem akuntansi keuangan desa masyarakat (X ₃)	Kumpulan elemen untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai dan sistem akuntansi keuangan desa dibuat oleh kepala desa guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama (Musdalifah, 2020).	1. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa 2. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa 3. Laporan realisasi penggunaan dana desa 4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa	Likert	1 – 4

Sumber: Data diolah (2022)

3.5 Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data, metode yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. Regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berdampak signifikan dan positif terhadap variabel dependen. Bentuk persamaan regresinya yaitu (Sugiyono, 2019:204) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X₁ = Peran perangkat desa

X₂ = Aksesibilitas laporan keuangan

X₃ = Sistem akuntansi keuangan desa masyarakat

e = Error

3.6 Pengujian Data

Sebelum data diolah lebih lanjut, harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Karena kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari pengguna instrumen.

3.6.1 Pengujian Validitas

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2019:224). Uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner dalam penelitian ini. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan uji *Person Product – Moment Coefficient of Correlation*. Penelitian dinyatakan valid, jika $R_{hitung} > R_{tabel}$.

3.6.2 Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas yaitu untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan pada uji reliabilitas adalah metode *Cronbach Alpha* (α) yang lazim digunakan untuk pengujian kuesioner. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau $\alpha > 0,6$ (Sekaran, 2017:182).

3.6.3 Pengujian Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan hasil yang sah (tidak bias) maka sebelum melakukan pengujian hipotesis atau analisis regresi maka akan terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yaitu meliputi pengujian :

a. Uji Normalitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut Ghazali (2016; 76-77) jika distribusi data adalah normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis normal. Dasar untuk pengambilan keputusan yaitu : Jika data menyebar diantara garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dan jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model asumsi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi, terjadi pengaruh yang signifikan antar prediktor dengan nilai residualnya. Jika berpengaruh signifikan maka telah terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan dalam mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas ialah dengan melakukan uji gletser. Jika nilai *sig.* pada tabel koefisien hasil regresi masing-masing variabel independen dengan residualnya signifikan (*sig.* < 0.10), maka hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak (*sig.* > 0.10),

maka hal ini mengindikasikan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

3.7 Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengukuran variabel dalam penelitian ini maka dilakukan pengujian untuk setiap hipotesis. Untuk menentukan menerima atau menolak hipotesis yang diajukan, maka dilakukan uji-F dan uji-t untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikan 5%.

1. Uji-F (uji secara bersama-sama)

H_{01} : Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa masyarakat secara simultan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

H_{a1} : Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima, peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

2. Uji-t (Parsial)

H_{02} : Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, peran perangkat desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

- H_{a2} : Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima, peran perangkat desa secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
- H_{o3} : Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_o diterima, aksesibilitas laporan keuangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
- H_{a3} : Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima, aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
- H_{o4} : Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_o diterima, sistem akuntansi keuangan desa masyarakat secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
- H_{a4} : Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima, sistem akuntansi keuangan desa masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Banda Raya

Kecamatan Banda Raya adalah salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh dengan Luas Wilayah 479 Km². Berdasarkan Perda Kota Banda Aceh Nomor 8 tahun 2000 Banda Aceh mengalami pemekaran wilayah dari 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan. Kecamatan Banda Raya merupakan pemekaran dari Kecamatan Meuraxa. Kecamatan ini memiliki 10 gampong dan 41 dusun. Berikut namanama gampong di kecamatan ini:

1. Gampong Lam Ara
2. Gampong Lampeut
3. Gampong Mibo
4. Gampong Lhong Cut
5. Gampong Lhong Raya
6. Gampong Peunyeurat
7. Gampong Lam Lagang
8. Gampong Geuceu Komplek
9. Gampong Geuceu Iniem
10. Gampong Geuceu Kayee Jato

Selain memiliki gampong dan dusun, kecamatan ini juga memiliki mukim. Mukim adalah gabungan dari gampong dan merupakan kesatuan hukum yang bercorak

agama yang mana pimpinan mukim disebut dengan imeum mukim. Kecamatan Banda Raya memiliki dua kemukiman, yaitu Kemukiman Banda Jaya dan Kemukiman Lam Ara. Kemukiman Banda Raya terdiri dari 4 gampong, yaitu : Lam Lagang, Geuceu Komplek, Geuceu Iniem, dan Geuceu Kayee Jato. Sedangkan Kemukiman Lam Ara terdiri dari 6 gampong, yaitu : Lam Ara, Lampeuot, Mibo, Lhong Cut, Lhong Raya, dan Peunyeurat.

4.1.2 Karakteristik Responden

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yang disampaikan secara langsung oleh peneliti kepada para responden dalam hal ini yaitu Pegawai Kantor Desa Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh yang berjumlah 40 orang. Peneliti mengambil kembali kuesioner untuk selanjutnya ditabulasikan dan diolah menggunakan program SPSS versi 22.0.

Dari jumlah kuesioner yang diedarkan kepada responden sebanyak 40 kuesioner, semuanya telah dikembalikan dengan tingkat pengembalian kuesioner mencapai 100%, seluruh kuesioner yang disebarkan kembali semuanya, sehingga sampel akhir penelitian berjumlah 40 ($n=40$). Karakteristik responden seperti terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1.	Jenis kelamin • Laki-laki • Perempuan	17 23	42,5% 57,5%
2.	Usia • ≤ 25 Tahun • $> 25 - 35$ Tahun • $> 35 - 45$ Tahun • > 45 Tahun	- 9 17 14	- 22,5% 42,5% 35%
3.	Pendidikan Terakhir • DIII • S1 • Pasca Sarjana • Lainnya	13 19 - 8	32,5% 47,5% - 20%
4.	Masa Kerja • < 5 tahun • $5 - 10$ tahun • $10 - 15$ tahun • > 15 tahun	14 14 11 1	35% 35% 27,5% 2,5%
Jumlah		40	100%

Berdasarkan Tabel 4.1, maka dapat dijelaskan bahwa jenis kelamin pria lebih mendominasi pegawai bidang anggaran pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh yaitu sebanyak 42,5% atau 17 orang berjenis kelamin laki-laki dan 57,5% atau 23 orang berjenis kelamin perempuan. 9 orang atau berusia $> 25 - 35$ tahun dan 17 orang berusia $> 35 - 45$ tahun, 14 orang atau 35% berumur lebih dari 45 tahun. Ditinjau dari pendidikan terakhir responden, diketahui bahwa dari seluruh

responden penelitian sebanyak 13 orang berpendidikan DIII, Sarjana berjumlah 19 orang (47,5%), dan dengan pendidikan lainnya berjumlah 8 orang (20%).

Dan jika dilihat dari masa kerjanya, 14 orang atau 35% dengan masa kerja kurang dari 5 tahun, 14 orang atau 35% dengan masa kerja 5 - 10 tahun, 11 orang atau 27,5% dengan masa kerja 10 – 15 tahun dan 1 orang atau 2,5% dengan masa kerja lebih dari 15 tahun.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Peran perangkat desa

Variabel ini dijabarkan dalam 3 (tiga) pernyataan, hal ini terlihat seperti pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Peran perangkat desa

N O	Variabel	STS		TS		KS		S		SS		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	2	3										4
1	Kami memiliki sekretaris desa Sebagai pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan. Sebagai pelaksana urusan keuangan.	0	0	0	0	0	0	36	90,0	4	10,0	4,100
2	Kami memiliki pelaksana wilayah desa yang Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya terhadap penyerapan anggaran yang telah di rekanakan	0	0	0	0	0	0	15	37,5	25	62,5	4,625

Berdasarkan Tabel 4.3, maka dapat dijelaskan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan diperoleh nilai rerata sebesar 4.250 yang bermakna bahwa responden dalam penelitian ini menyatakan setuju jika Desa selalu mengupdate informasi segala kegiatan yang dapat dikonsumsi oleh publik.

4.2.3 Sistem keuangan desa

Variabel ini dijabarkan dalam 4 (empat) pernyataan, terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Sistem keuangan desa

N O	Variabel	STS		TS		KS		S		SS		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	2	3										4
1	Kami melaporkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan dan Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya	0	0	0	0	1	2,5	34	85,0	5	12,5	4,100
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota yang terdiri dari laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan	0	0	0	0	0	0	38	95,0	2	5,0	4,050

	dengan peraturan desa											
3	Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester	0	0	0	0	0	0	36	90,0	4	10,0	4,100
4	Kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa	0	0	0	0	0	0	15	37,5	25	62,5	4,625
Rerata												4,219

Berdasarkan Tabel 4.3, maka dapat dijelaskan bahwa variabel sistem keuangan desa diperoleh nilai rerata sebesar 4.219 yang bermakna bahwa responden dalam penelitian ini menyatakan setuju jika mereka menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa.

4.2.4 Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Variabel ini dijabarkan dalam 2 (dua) pernyataan, terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

N O	Variabel	STS		TS		KS		S		SS		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	2	3										4
1	Kami selalu menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota	0	0	0	0	0	0	36	90,0	4	10,0	4,100
2	Kami selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran	0	0	0	0	0	0	17	42,5	23	57,5	4,575
Rerata												4.338

Berdasarkan Tabel 4.5, maka dapat dijelaskan bahwa variabel sistem keuangan desa diperoleh nilai rerata sebesar 4.338 yang bermakna bahwa responden dalam penelitian ini menyatakan setuju jika mereka telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

4.3 Hasil Pengujian Data

4.3.1 Pengujian Instrumen

a. Hasil Pengujian Validitas

Uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner dalam penelitian ini. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *Uji Person Product Movement Coefficient of Corelation* dengan bantuan SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*). Untuk penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.6 bahwa hasil pengujian nilai kritis untuk mengukur kedua variabel dalam penelitian ini adalah 0,344. Maka item pertanyaan dinyatakan valid karena mempunyai koefisien korelasi diatas nilai kritis korelasi *product moment*. Seperti terlihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Validitas

No	Pernyataan	Variabel	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis 5% (df = N-3)	Keterangan
1	A1	X ₁	0,813	0,312	Valid
2	A2		0,717	0,312	Valid
3	A3		0,802	0,312	Valid
4	B1	X ₂	0,725	0,312	Valid
5	B2		0,596	0,312	Valid
6	B3		0,625	0,312	Valid
7	C1	X ₃	0,805	0,312	Valid
8	C2		0,433	0,312	Valid
9	C3		0,813	0,312	Valid

10	C4		0,659	0,312	Valid
11	D1	Y	0,590	0,312	Valid
12	D2		0,872	0,312	Valid

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini semuanya memiliki tingkat signifikansi dibawah 5%, maka item pernyataan dinyatakan valid, karena nilai r -hitung $>$ nilai r -tabel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 responden, jadi nilai r -tabel nya adalah 0,312, dan semua hasil dari kedua variabel mendapat nilai koefesien korelasi lebih dari 0,312, sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

b. Hasil Pengujian Reliabilitas

Untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas *cronbach alpha* yang lazim digunakan untuk pengujian kuesioner dalam penelitian ilmu sosial. Analisis ini digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel. Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten juga dilakukan secara statistik yaitu dengan menghitung besarnya *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS versi 23.0. seperti terlihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Alpha
Peran perangkat desa (X_1)	3	0,623
Aksesibilitas laporan keuangan (X_2)	3	0,681
Sistem keuangan desa (X_3)	4	0,635
Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y)	2	0,690

Berdasarkan Tabel 4.7, maka pengujian reliabilitas dengan *cronbach alpha* terhadap 15 pernyataan yang telah dinilai jawabannya, maka dapat dilihat bahwa alpha untuk variabel peran perangkat desa sebesar 0,649, variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,707, sistem keuangan desa nilainya 0,737 dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki nilai alpa 0,624. karena memiliki nilai $> 0,6$, mengacu kepada syarat suatu instrumen dikatakan reliabel memiliki alpha $> 0,6$, maka kuesioner penelitian ini dinyatakan reliabel untuk dilakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

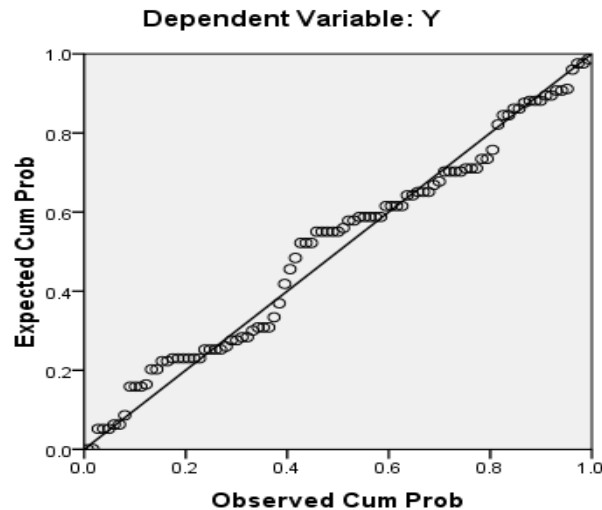
4.3.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

a. Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas menggambarkan residul variabel yang terdistribusi normal akan terletak disekitar garis horizontal (tidak terpancar jauh dari garis diagonal). Berdasarkan uji normalitas gambar normal P-P Plot menunjukkan sebaran *standarrized residul* berada dalam kisaran garis diagonal. Seperti terlihat pada gambar

berikut. Normal P-P Plot menunjukkan sebaran *standarrized residul* berada dalam kisaran garis diagonal. Seperti terlihat pada Gambar 4.1.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

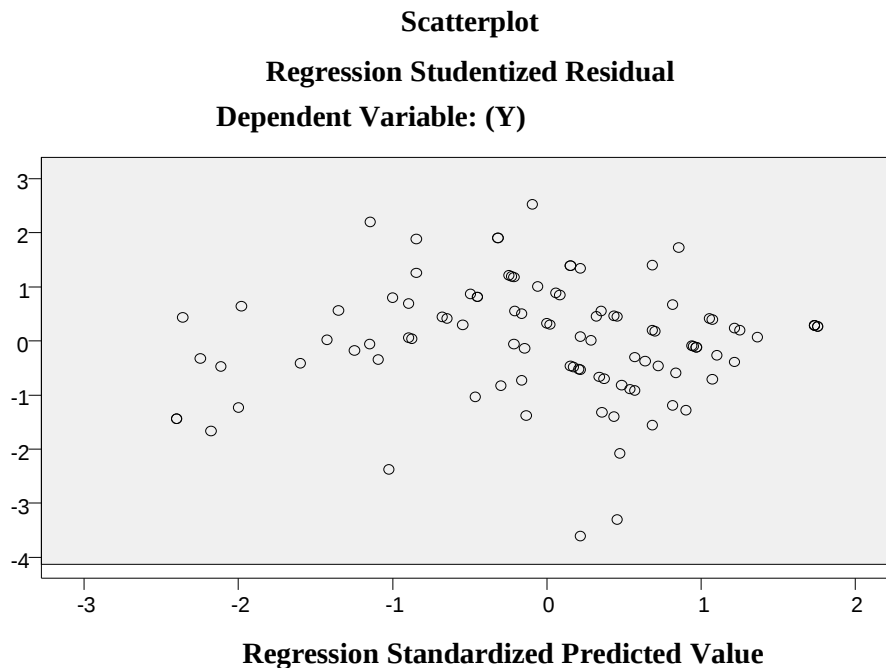


Gambar 4.1. P.Plot

Berdasarkan gambar 4.1 uji normalitas untuk persamaan transparansi, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem keuangan desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada histogram dan *normal probability plot* di atas dapat dilihat bahwa histogram distribusi data dalam bentuk lonceng (*bell shaped*) dan garis *normal probability plot* yang menggambarkan sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya. Dengan demikian maka data yang diolah mengikuti atau mendekati distribusi normal.

b. Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka homokedastisitas, dan jika *varians* berbeda disebut heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS dengan mengamati pola yang terdapat pada *Scatterplot*, dimana hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut :



Gambar 4.2
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 4.2 uji heteroskedastisitas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4 Regresi Linier Berganda

Untuk melihat pengaruh sistem peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya, menggunakan regresi linier berganda. Seperti pada Tabel 4.8

Tabel 4.8
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.777	2.478		3.138	.003		
X1	.888	.430	1.302	4.064	.006	.059	16.834
X2	.411	.198	.015	4.054	.007	.323	3.096
X3	.720	.477	1.032	5.510	.000	.051	19.770

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS seperti terlihat pada tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi untuk pengaruh peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem keuangan desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Persamaannya dapat kita lihat sebagai berikut:

$$Y = 4,777 + 0,888X_1 + 0,411X_2 + 0,720X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 4,777 artinya bila mana peran perangkat desa (X_1), aksesibilitas laporan keuangan (X_2) dan sistem keuangan desa (X_3) dianggap konstan, maka Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh adalah sebesar 4,777 pada satuan skala Likert.

Koefesien regresi peran perangkat desa (X_1) sebesar 0,888 artinya setiap 100% perubahan dalam variabel peran perangkat desa secara relatif akan meningkatkan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh sebesar 88,8%.

Koefesien regresi aksesibilitas laporan keuangan (X_2) sebesar 0,411 artinya setiap 100% perubahan dalam variabel aksesibilitas laporan keuangan akan meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh sebesar 41,1%.

Koefesien regresi sistem keuangan desa (X_3) sebesar 0,720 artinya setiap 100% perubahan dalam variabel sistem keuangan desa akan meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh sebesar 72,0% dengan asumsi variabel kompensasi (X_3) dianggap konstan.

4.5 Koefesien Determinasi

Hasil pengolahan data juga menunjukkan hubungan antara variabel predictor dengan kriteriumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi/koefisien determinasi yang dihasilkan oleh sebuah persamaan regresi yang dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Model Summary

Model Summary ^b							
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	Sig. F Change
1	.586 ^a	.649	.078	.59086	.149	2.107	.116

a. Predictors: (Constant), X_3 , X_2 , X_1

b. Dependent Variable: Y

Koefesien Determinasi (R^2) sebesar 0,649 artinya sebesar 64,9 % perubahan-perubahan dalam variabel terikat (sistem keuangan desa) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam Faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem keuangan desa.

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk keempat rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

H_1 : Nilai F_{hitung} sebesar 12,107 > F_{tabel} sebesar 2,839, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima. Artinya peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)

H_2 : Nilai t_{hitung} sebesar 4,046 > t_{tabel} sebesar 1,684, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima. Artinya peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

H_3 : Nilai t_{hitung} sebesar 4,054 > t_{tabel} sebesar 1,684, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima. Artinya aksesibilitas laporan keuangan

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

H_4 : Nilai t_{hitung} sebesar 5,510 > t_{tabel} sebesar 1,684, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima. Artinya sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pembahasan Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa Konstanta (α) sebesar 4,777 yang berarti jika variabel peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem keuangan desa dianggap konstan, maka besarnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh sebesar 47,77%.

Semakin baik peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem keuangan desa, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh akan semakin meningkat. setiap dilakukan peningkatan peran perangkat desa pada kantor desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Begitu pula dengan adanya aksesibilitas laporan keuangan dan sistem keuangan desa yang baik, yang juga akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Redi (2019) yang meneliti mengenai Aksesibilitas laporan keuangan dan Peran perangkat

desa, terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintahan di kabupaten Dairi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksesibilitas laporan keuangan dan Peran perangkat desa memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan baik parsial maupun simultan pada pemerintahan desa.

4.7.2 Pembahasan Peran perangkat desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai Koefisien regresi variabel peran perangkat desa sebesar 0,888, yang berarti bahwa setiap meningkatnya perencanaan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh sebesar 88,8%.

Peran perangkat desa menjadi syarat penting yang harus dipenuhi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan indikator peran perangkat desa yaitu sekretaris desa, pelaksana wilayah desa dan pelaksana teknis desa, pada kecamatan Kecamatan Banda Raya, tiap desa memiliki semua aspek indikator dalam peran perangkat desa, dari hasil penelitian lapangan di dapatkan bahwa setiap gampong memiliki peran perangkat desa sesuai dengan kapasitas nya masing-masing. sehingga akuntabilitas pengelolaan desa dapat terlaksana dengan baik. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah (2020) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan

Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

4.7.3 Pembahasan Pengaruh Aksesibilitas laporan keuangan Terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya. Hal ini dibuktikan dengan hasil Koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,411, yang berarti bahwa setiap meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 41,1%.

Variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap serapan anggaran pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya, dengan adanya aksesibilitas laporan keuangan, prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pun akan baik.

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa pada kecamatan Banda Raya setiap gampong wajib menerapkan prinsip aksesibilitas laporan keuangan yaitu peran perangkat desa, setiap desa wajib mengemukakan fakta-fakta tentang kinerja nya. Kewajiban yaitu setiap desa wajib menyelesaikan dan menghadapi konsekuensi atas kinerjanya. Keterkendalian yaitu setiap desa melakukan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti laporan-laporan yang sesuai dengan sistem keuangan desa

(Siskeudes). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2019) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi, Aksesibilitas laporan keuangan, dan Sistem akuntansi keuangan desa Masyarakat terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

4.7.4 Pembahasan Pengaruh Sistem keuangan desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya. Hal ini dibuktikan dengan hasil Koefisien regresi variabel sistem keuangan desa sebesar 0,720, yang berarti bahwa setiap meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 72,0%.

Variabel sistem keuangan desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya, dengan adanya sistem keuangan desa, maka akan adanya pembaharuan-pembaharuan sistem yang kurang baik, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pun akan baik. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lily (2015) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem keuangan desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.
2. Peran perangkat desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
3. Aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
4. Sistem keuangan desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Mengenai responden, agar penelitian dapat dikatakan lebih representatif, maka diharapkan dalam penelitian selanjutnya, kapasitas nya lebih luas tidak hanya pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya.
2. Menambahkan variabel penelitian sehingga penelitian dapat lebih meyakinkan

DAFTAR PUSTAKA

- Agusthian. Ananda. (2020). Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (Add) Studi Pada Desa Lam Ara Di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)* Vol.5,No. 2
- Agustinus Kali. (2011). Analisis Partisipasi Masyarakat terhadap perencanaan dan pembangunan PLTMH di Poniki Desa Pombawe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, *Jurnal Mektek Tahun Xiii* No. 3 September 2011 di akses tanggal 2 maret 2017.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bicu, YS. (2013). *Kamus Bahasa Indonesia* . Jakarta: Citra Harta Prima.
- Bougie, Roger dan Utama Sakaran, (2010). *Research Methods For Business, Fifth Edition*. John Wiley And Sons Ltd.
- Djalil, Rizal. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka.
- Djati & Husaini. (2014). Kajian terhadap kepuasan kompensasi, komitmen organisasi dan perestas kerja. *Jurnal Manajemen*. Vol 7, No.2, Hal 1-6
- Fatimah, Siti. (2012). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan EKTP di desa Taratak Bulu Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. Skripsi. UIN Riau, Pekanbaru.
- Frink dan Klimoski (2014). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah. *Jurnal Sektor Publik*. Vol II, No.2, Hal 22-27
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program. IBM SPSS* 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit.
- Halim. Abdul (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Engeluaran Pemerintah*. Jakarta: Seleba Empat.
- Inpres No.7 Tahun 1999, *Tentang Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah*.
- Kaswan 2015. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung. Indonesia : Alfabeta.

- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2015). *Indeks Desa Pembangunan*. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kunandar. (2014). *Penilaian Autentik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat. (2013). *Mudah Memahami & Menganalisis Indikator. Ekonomi*. Yogyakarta
- Mada. (2017). *Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Simeulue Timur*. Bisnis dan Manaj Islam.
- Makalalang, Juainita. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotomobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*. Vol 8 No. Hal 148-159.
- Mardiasmo. (2012). Otonomi daerah sebagai upaya memperkokoh basis perekonomian daerah. *Jurnal ekonomi rakyat*. Vol 1, No.1. Hal. 1-11
- Nadir Sakina. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Politik Profetik*. Vol 1, No.1. Hal. 1-21.
- Nafidah LN, Suryaningtyas M. Akuntabilitas. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol 2, No.19. Hal. 1-11.
- Nurhanifah. (2018). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol.13, No.2 Hal. 193-211
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah 43 / 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pidarta, Made. (2010), *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Bandung: PT Alfabet.
- Pasaribu. & Simanjuntak. (2012). *Kebudayaan dan Masyarakat*. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro.
- Sjafrizal. (2015) *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar).

- Sutrisno. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan ke-8. Jakarta
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugyiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfbet.
- Syachbrani, Warka. (2012). *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Megister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Binis. Yogyakarta: Universits Gajah Mada.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu* (Edisi Kedua). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tahir. (2019). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read. Suyadi, Prawirosentono
- Tarjo. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi pada Desa Muara Niro Kecamatan VII Kroto Kabupaten Tebo)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT). Tebo
- Wibowo, (2016). *Manajemen Kinerja*, Edisi Kelima, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta-14240.
- Widjaja. (2013). *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Megister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Binis. Yogyakarta: Universits Gajah Mada.

KUESIONER

**PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA, AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA
MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
STUDI PADA KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH**

I. Identitas Responden

1. jenis Kelamin:

☐

laki-laki

☐

Perempuan

2. Usia:

☐

25 – 30 tahun

☐

36 - 40 tahun

☐

31 – 35 tahun

☐

> 40 tahun

3. Pendidikan terakhir :

☐

DIII

☐

Pasca Sarjana

☐

S1

☐

lainnya

4. Masa Kerja

☐

1 – 5 Tahun

☐

11 - 15 tahun

☐

6 - 10 Tahun

☐

> 15 tahun

Alternatif Pilihan :

- (1) Sangat Tidak Setuju (STS)
- (2) Tidak Setuju (TS)
- (3) Kurang Setuju (KS)
- (4) Setuju (S)
- (5) Sangat Setuju (SS)

A. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Kami selalu menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota					
2	Kami selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran					

B. Peran Perangkat Desa

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Kami memiliki sekretaris desa Sebagai pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan. Sebagai pelaksana urusan keuangan.					
2	Kami memiliki pelaksana wilayah desa yang Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya terhadap penyerapan anggaran yang telah di rekanakan					
3	Kami memiliki pelaksana teknis desa yang membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa.					

C. Aksesibilitas Laporan Keuangan

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Semua kegiatan dan pelaksanaan APBDesa Terbuka dimedia masa					
2	Semua kegiatan dan pelaksanaan APBDesa mudah di akses					
3	Desa selalu mengupdate informasi segala kegiatan yang dapat dikonsumsi oleh publik					

D. Sistem Keuangan Desa

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Kami melaporkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan dan Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya					
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota yang terdiri dari laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa					
3	Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester					
4	Kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa					